

Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas *Internet Financial Reporting*

Pepie Diptyana

Program Studi Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia, Surabaya, Indonesia

Abstract. *Internet financial reporting (IFR) promotes transparency to maintain government-citizen relationship. Prior research has indicated that transparency in government depends on institutional and environmental factors. Nevertheless, those research shown heterogeneity results, so then academic researchers have difficulties to find out consistent conclusion. This research aims to identify financial factors which support local government IFR quality. We use 91 local governments in Indonesia as samples. Data was analyzed by multi regression and 5% significant level. Five independent variable were tested: liquidity, leverage, service level solvency (SLS) based on expenditure, SLS based on asset value, and financial dependence. Result shows that service level solvency as representation of local government ability to serve its citizen is significant to IFR quality.*

Keywords. *Asset; Local Government Expenditure; Internet Financial Reporting; Local Government Dependency.*

Abstrak. Penyajian laporan keuangan di internet merupakan wujud upaya transparansi bagi pemerintah daerah. Beberapa hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan transparansi keuangan pemerintah daerah didorong oleh faktor finansialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan terhadap kualitas internet financial reporting (IFR) pada pemerintah daerah di Indonesia. Pada penelitian ini, IFR diukur menggunakan indeks kualitas IFR. Faktor keuangan yang diteliti mencakup likuiditas, leverage, service level solvency (SLS) berbasis nilai belanja, SLS berbasis aset, dan ketergantungan daerah. Sampel sebanyak 91 dan dianalisis menggunakan regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SLS berbasis belanja berpengaruh signifikan negatif dan SLS berbasis aset berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas IFR.

Kata kunci. Aset Daerah; Belanja Daerah; Internet Financial Reporting; Ketergantungan Pemerintah Daerah.

Corresponding author. Email: pepie@perbanas.ac.id

How to cite this article. Diptyana, Pepie. (2019). Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Internet Financial Reporting. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(3), 513-530.

History of article. Received: Agustus 2019, Revision: Oktober 2019, Published: Desember 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i3.17830

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Teori agensi dan teori institusional menjelaskan bahwa institusi terdorong untuk mengungkapkan informasi keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik atas pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penyajian informasi juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu organisasi telah berusaha mencapai tujuan organisasinya. Sementara itu, teori legitimasi menjelaskan bahwa suatu organisasi dapat dipercaya atau bertahan hidup apabila berperilaku sesuai dengan norma yang ditentukan oleh masyarakat. Bagi organisasi publik, keterbukaan informasi keuangan perlu untuk memperoleh atau memelihara legitimasi publik. Pengimplementasian teknologi dan internet dapat digunakan untuk menunjukkan bukti inovasi serta diharapkan dapat

meminimumkan asimetri informasi antara organisasi publik dengan masyarakat.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia sudah banyak yang mengimplementasikan internet dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagian besar pemda lebih banyak memanfaatkan internet sebagai media untuk menyampaikan berita (Puspita & Martani, 2012; Ratmono, 2013; Trisnawati & Achmad, 2014). Puspita dan Martani (2012) menyatakan bahwa 11 dari 429 pemda sampel penelitian mereka yang memperoleh tingkat pengungkapan tertinggi, mencakup laporan keuangan, laporan anggaran, revisi anggaran, neraca, laporan kinerja. Terdapat 7 dari 11 pemda dengan tingkat pengungkapan tertinggi tersebut berada di Jawa. Ratmono (2013) yang

meneliti ketersediaan website pemda Jawa dan Bali di pertengahan tahun 2012, dan menyimpulkan bahwa hanya 15 dari 78 website resmi pemda yang mengunggah laporan keuangan dan laporan kinerja di website resmi mereka. Selanjutnya, Trisnawati & Achmad (2014) menyatakan bahwa di tahun 2012, hanya ada 28 dari 210 pemda sampel yang mengunggah laporan anggaran.

Faktor institusional berupa faktor keuangan pemerintah daerah diargumenkan sebagai faktor yang dapat mendorong institusi untuk menyajikan informasi keuangannya lebih transparan. Pemerintah yang kondisi finansialnya lemah akan tidak mampu menyajikan informasi keuangan dengan baik (Styles & Tennyson, 2007). Yu (2010) membuktikan bahwa kondisi finansial berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan pemda. Semakin tinggi kemampuan finansial suatu daerah maka aksesibilitas informasi berbasis internetnya akan semakin baik. Faktor finansial seperti *size* (Hilmi & Martani, 2012; Garcia & Garcia-Garcia, 2010; Styles & Tennyson, 2007), *leverage* (Styles & Tennyson, 2007), kekayaan (Pereira, et al., 2012; Hilmi & Martani, 2012; Martani, et al., 2014; Utomo & Aryani, 2016), investasi per kapita (Garcia & Garcia-Garcia, 2010), tingkat ketergantungan (Martani, Fitriyani, & Annisa, 2014; Diptyana & Rokhmania, 2018), dan kemampuan aset pemerintah mendanai belanja (Styles & Tennyson, 2007) berpengaruh terhadap IFR.

Bolívar, Muñoz, & Hernández (2013) melakukan meta-analisis pada artikel-artikel penelitian untuk menggali determinan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Disimpulkan bahwa pada institusi pemerintah daerah, kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Namun demikian, hasil-hasil riset yang menggunakan variabel keuangan sebagai variabel independennya menunjukkan nilai variabilitas yang tinggi sehingga ini menunjukkan bahwa hasil-hasil riset tersebut cukup beragam, tergantung dari karakteristik penelitiannya.

Penelitian yang menguji faktor pendorong kualitas IFR di pemda masih

terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu, terutama di Indonesia, memberi perhatian IFR hanya pada konten saja atau keteraksesan saja, belum mempertimbangkan hal lain pada kualitas informasi di internet, seperti ketepatan waktu penyajian, teknologi yang digunakan, serta dukungan untuk pengguna saat mengakses informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kondisi keuangan Pemerintah Daerah dengan kualitas IFR. Kualitas IFR tersebut mencakup konten informasi yang disajikan, ketepatan waktu penyajian informasi, teknologi yang digunakan dan webuser support (dukungan untuk pengguna informasi). Kondisi keuangan pemda yang diteliti meliputi *short-term solvency*, *debt ratio*, *service level solvency* berbasis aset, *service level solvency* berbasis belanja dan ketergantungan finansial pemda.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Menurut teori ini, terdapat hubungan antara agen dan prinsipal dalam bentuk pengambilan keputusan. Prinsipal sebagai pemilik otoritas mempercayakan otoritas dan tanggungjawabnya kepada agen untuk mengambil keputusan yang dapat memenuhi kepentingan prinsipal. Konflik kepentingan yang terjadi adalah ketika agen harus memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan prinsipal, sementara itu agen yang telah bekerja akan menerima kompensasi sebagaimana yang telah disepakati antara agen dan prinsipal. Pada organisasi pemerintahan, pihak yang berkepentingan (prinsipal) dan para politisi (agen – di sektor publik) berbagi *benefit* dan *cost*. Berlinski, Dewan, & Dowding (2012) berargumen bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal pada teori agensi juga terjadi pada organisasi sektor publik. Prosedur demokrasi memungkinkan adanya insentif bagi agen yang berupa terpilihnya kembali seorang *political manager*. Selain berupa keterpilihan kembali, Menurut Laswad, Fisher, & Oyelere (2005), para pengelola organisasi sektor publik (seperti bupati, walikota, gubernur) dapat memperoleh insentif berupa kepercayaan publik, dan dapat diperoleh dari pengungkapan sukarela. Politisi

yang terpilih menyediakan informasi untuk menunjukkan bahwa mereka memenuhi janji-janji politis saat kampanye atau sebelum pemilihan, sehingga insentif untuk mereka dapat meningkat selaras dengan meningkatkan kompetisi politis. Penyajian informasi keuangan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal dan menurunkan *agency cost*. Berdasarkan teori agensi, penyajian informasi keuangan melalui internet merupakan upaya untuk mengurangi asimetri informasi tersebut.

Teori Institusional

Institusi yang kinerjanya sulit diukur secara langsung, akan terdorong untuk mengembangkan aktivitas dan struktur pekerjaan yang teridentifikasi secara internal dan eksternal sebagai legitimasi (Scott, 1987). Teori institusional menyatakan bahwa organisasi melakukan perubahan struktural untuk merespon tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka (DiMaggio & Powell, 1983). Ekspektasi dan tekanan terhadap organisasi digambarkan seperti kandang besi (*iron cage*), yang mendorong institusi untuk melakukan *isomorphism* atau peniruan atau melakukan pengimplementasian faktor-faktor dan strategi agar muncul kemiripan antara institusi dengan ekspektasi lingkungan. DiMaggio & Powell (1983) menyarankan tiga tipe proses *isomorphic*, yaitu : *coercive*, *mimetic* dan *normative*. *Coercive isomorphism* terjadi ketika organisasi tergantung pada organisasi lain, dan organisasi lain yang lebih kuat pengaruhnya tersebut memberikan tekanan, seperti regulasi pemerintah atau standar-standar baru. *Mimetic isomorphism* muncul dari ketidakjelasan teknologi di dalam institusi, yang dapat menyebabkan institusi tersebut kurang mampu menjadi unggul dibandingkan institusi lain. *Mimetic isomorphism* ini prosesnya adalah dengan organisasi meniru dari organisasi lain yang terbukti sukses, atau sudah mendapatkan legitimasi. Misalnya, universitas lain memperbarui fasilitas mahasiswa, sehingga universitas-universitas lain juga ikut memperbarui fasilitas mahasiswanya agar tetap kompetitif. *Normative isomorphism*

terjadi karena ada kelompok profesional yang berperan memperjuangkan praktik adopsi yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan teori institusional, praktik *internet financial reporting* (IFR) di pemda digunakan sebagai norma yang dapat diterima sosial sebagai bagian dari upaya mendapatkan legitimasi, dari konteks institusional pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat, pihak legislatif, investor potensial, dan organisasi-organisasi lainnya sehingga memperoleh legitimasi.

Dalam konteks IFR, implementasi teknologi dalam transparansi keuangan di pemda menunjukkan bahwa institusi pemerintah daerah berusaha untuk merespon tekanan dan permintaan informasi finansial dari publik (Munoz, Bolivar, & Hernandez, 2017). Penggunaan internet memungkinkan informasi dapat tersebar luas dan cepat. Para manajer di pemerintah daerah juga berusaha untuk mengungkapkan informasi dengan tujuan untuk menanggapi opini negatif pada manajemen pemda.

Pina, Torres, & Royo (2015) menyatakan bahwa teori agensi dan teori institusional adalah teori yang saling komplementer dalam menjelaskan pelaporan keuangan pemda. Pelaporan keuangan pemda adalah untuk mengurangi asimetri informasi (teori agensi), dan juga untuk memperoleh legitimasi dari konteks institusional (teori institusional).

Pengembangan Hipotesis *Likuiditas dan Kualitas IFR*

Likuiditas menggambarkan kemampuan entitas untuk dapat melunasi utang dalam jangka pendek. Hubungan antara likuiditas dengan pengungkapan informasi keuangan terkait dengan teori agensi. Dari sudut pandang teori agensi, mekanisme pelaporan keuangan yang baik akan mengurangi asimetri informasi antara kreditur sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agensi. Dari sudut pandang teori legitimasi, *short-term solvency* atau likuiditas menunjukkan kredibilitas kinerja manajemen

keuangan insitusi. Oleh karena itu, institusi yang memiliki likuiditas baik cenderung membuat manajer institusi bersedia menyajikan informasi keuangan insitusi yang dikelolanya. Oyelere et al (2003) membuktikan bahwa pemerintah daerah yang mampu melunasi utang jangka pendeknya menunjukkan indeks IFR yang lebih tinggi. Likuiditas dipandang sebagai berita baik, yang perlu disajikan untuk membuktikan bahwa pemerintah mampu mendanai operasional layanan publik. Dengan demikian informasi likuiditas ini perlu diungkapkan. Selain itu, likuiditas yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan sistem informasi yang memadai, sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih baik pula.

H1 : Semakin tinggi Likuiditas Pemda, maka Kualitas IFR-nya semakin baik.

Leverage dan Kualitas IFR

Leverage menunjukkan kemampuan suatu institusi untuk melunasi utang jangka panjangnya Ritonga, et al. (2012) menyimpulkan bahwa *longterm solvency*, yang salah satu indikatornya adalah *leverage* – merupakan dimensi kondisi finansial yang dianggap paling penting oleh para pengguna laporan keuangan pemerintah.. Beberapa penelitian menggunakan variabel *leverage* (rasio utang jangka panjang : total aset dan rasio utang jangka panjang : total ekuitas) untuk menggambarkan *longterm solvency* (Laswad, et al., 2005; Styles & Tennyson, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap eksistensi IFR (Laswad, et al., 2005; Styles & Tennyson, 2007, Damaso & Laurengo, 2011). IFR dapat tersaji dengan dukungan infrastruktur sistem informasi yang memadai, dan dibangun dengan strategi yang tepat. Pengembangan infrastruktur sistem informasi pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu melunasi utang jangka panjangnya menggambarkan komitmen terhadap pengembangan strategi jangka panjang, sehingga mampu menyajikan IFR lebih baik. Dari sudut pandang teori

agensi, penyajian laporan keuangan dipercaya dapat menurunkan *cost of capital* yang muncul dari pembiayaan utang untuk aktivitas publik.

H2 : Semakin tinggi *Leverage* Pemda, maka Kualitas IFR-nya semakin baik.

Service Level Solvency Berbasis Belanja dan Kualitas IFR

Nilai realisasi belanja pemerintah menggambarkan aktivitas pelayanan ke masyarakat. Berdasarkan teori legitimasi, untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat maka institusi pemerintah cenderung menyajikan angka belanja untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat. Semakin tinggi nilai belanja, maka pemerintah daerah cenderung akan menyajikan informasi keuangannya.

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh nilai belanja terhadap pengungkapan informasi keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Martani, et al., (2014) dan Alhajjriana, et al., (2017) membuktikan bahwa total belanja berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan pemda. Sementara itu, Purwanti, et al., (2017) membuktikan bahwa belanja modal signifikan negatif terhadap transparansi keuangan pemda yang disajikan melalui internet. Nainggolan, et.al (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh total belanja terhadap pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Salah satu indikator kondisi keuangan pemda adalah *Service Level Solvency* berbasis nilai Belanja (Ritonga, Clark, & Wickremasinghe, 2012). *Service Level Solvency* (SLS) berbasis belanja menunjukkan nilai realisasi belanja yang dikeluarkan pemda untuk setiap jiwa penduduknya. Rasio Belanja dengan jumlah penduduk diargumenkan lebih menggambarkan bagaimana kemampuan keuangan pemda untuk melayani setiap jiwa penduduknya, daripada menggunakan indikator Total Belanja saja. Oleh karena itu pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Semakin tinggi nilai *Service Level Solvency* berbasis Belanja pada Pemda maka Kualitas IFR semakin tinggi.

Service Level Solvency berbasis Aset dan Kualitas IFR

Menurut teori agensi, nilai aset yang tinggi merupakan sinyal baik bagi para *stakeholders*. Pemerintah yang memiliki nilai aset yang tinggi menunjukkan potensi untuk tetap dapat melayani masyarakatnya dengan baik. Apabila dikaitkan dengan teori legitimasi, maka pemerintah daerah yang memiliki nilai aset yang tinggi cenderung lebih terbuka menyajikan informasinya. Styles, et al., (2007) juga membuktikan bahwa pemda yang memiliki *unrestricted asset* yang tinggi maka cenderung menyajikan IFR dengan lebih baik. Namun, Nainggolan, et al. (2016) dan Yustikasari (2018) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh total aset terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah di website. Jumlah populasi menggambarkan banyaknya masyarakat yang dilayani oleh Pemda. Oleh karena itu, semakin besar rasio total aset terhadap jumlah penduduknya maka semakin tinggi nilai aset yang disediakan pemda untuk setiap jiwa penduduknya. Teori agensi dan legitimasi mensinyalkan bahwa institusi dengan nilai aset yang besar cenderung menyajikan informasi lebih baik, sementara terjadi hasil riset yang kontradiktif pada riset-riset sebelumnya, maka penelitian ini menguji kembali apakah aset pemda yang disediakan untuk tiap penduduk berpengaruh terhadap kualitas *internet financial reporting* pada pemda tersebut.

H4 : *Service Level Solvency* berbasis Aset berpengaruh terhadap Kualitas IFR.

Ketertanggungjawaban Keuangan Pemda dan Kualitas IFR

Martani, Fitriyanti, & Annisa (2014) mengutip Robbins dan Austin (1986) yang menyebutkan bahwa *intergovernmental revenue* tingkat ketertanggungjawaban pemerintah daerah. Ingram & DeJong (1987) membuktikan bahwa ternyata terdapat hubungan antara pengungkapan informasi keuangan pemda dengan insentif ekonomi yang diberikan kepada *local political manager* (kepala daerah). Menurut Ingram dan DeJong (1987) dengan kondisi pemda di US saat itu,

perilaku regulasi ini berbeda dengan kondisi regulasi pada perusahaan yang *listed* di bursa efek. Pada perusahaan emiten, regulasi untuk pelaporan keuangan ditentukan oleh SEC. Sementara itu, pada pemerintah daerah, regulasinya dapat berbeda-beda. Ada daerah yang telah menentukan regulasi pengungkapan akuntansi dengan menerapkan GAAP, ada yang non-GAAP, ada yang tidak menentukan regulasi. Ternyata, pengungkapan informasi keuangan pada daerah yang menentukan regulasi dan yang tidak menentukan regulasi tidak berbeda secara signifikan. Kemudian, Ingram dan DeJong (1987) mengembangkan analisisnya dengan menguji pengaruh keterlibatan variabel politik dan ekonomi-sosial. Terbukti bahwa kondisi politik dan ekonomi sosial dapat membedakan praktik pengungkapan informasi keuangan pemda. Salah satu proksi kondisi politik adalah nilai transfer dari pemerintah pusat ke pemda. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah tersebut memungkinkan adanya hubungan monitoring dari pusat ke daerah. Menurut Ingram dan DeJong (1987), transfer dari pusat tersebut dipandang sebagai insentif bagi kepala daerah karena dengan bantuan transfer tersebut, kepala daerah dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan perkembangan daerahnya, seperti percepatan pembangunan, menurunkan biaya pajak daerah, perbaikan property daerah, dan sebagainya. Terbukti bahwa dana transfer berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan (Ingram, et al., 1987). Guillaumon, et al. (2011) menggambarkan transparansi sebagai tanggungjawab politik atas penerimaan dana transfer yang diterima pemda. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa bahwa semakin tinggi dana transfer yang diterima oleh pemda, maka pemda tersebut akan lebih transparan dalam menyajikan informasi (Guillaumon, et al., 2011). Di Indonesia, ketertanggungjawaban pemerintah daerah tampak dari besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerima DAU lebih besar memiliki tingkat pengungkapan informasi keuangan yang lebih tinggi (Puspita & Martani, 2012; Martani, et al., 2014).

Diptyana, et al. (2018) menguji sampel pemda tingkat provinsi saja, dan menyimpulkan bahwa ketergantungan finansial pemda provinsi berpengaruh signifikan positif terhadap IFR-nya.

Walaupun demikian, ada beberapa riset yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel ketergantungan pemda dengan variabel pengungkapan informasi keuangan tidak terbukti signifikan. Nainggolan, et al., (2016) menguji pengaruh variabel kemandirian keuangan daerah yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terbukti signifikan terhadap pengungkapan dan aksesabilitas informasi keuangan daerah). Demikian juga dengan Hilmi & Martani (2012) yang menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya pengaruh tingkat ketergantungan yang diukur dengan rasio dana transfer dengan pendapatan total, terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan. Menggunakan 152 sampel kabupaten dan kota, Idris, Surasni, & Irwan (2018) tidak dapat membuktikan pengaruh signifikan ketergantungan pemda terhadap penyajian Laporan Keuangan di internet.

Pemberian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat menimbulkan hubungan antara prinsipal dan agen. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan Dana Alokasi Umum kepada Pemerintah Daerah untuk membantu pemda agar dapat lebih maju, dan pemda bertanggungjawab untuk menginformasikan penggunaannya.

H5 : Semakin tinggi Ketergantungan Keuangan Pemda terhadap Pusat, maka Kualitas IFR semakin tinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki situs resmi yang terdaftar di Kementrian Dalam Negeri dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sampel dipilih berdasarkan kriteria berupa situs resmi pemda yang dapat diakses dan data keuangan setiap variabelnya tersedia lengkap. Pengamatan situs dilakukan pada Januari sampai dengan April 2018, dan data keuangan yang digunakan

adalah tahun 2016. Data jumlah penduduk menggunakan data dari BPS.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel	Pengukuran
<i>Likuiditas</i>	<i>Current ratio</i> = rasio aset lancar dibagi dengan utang lancar
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> = rasio Utang Jangka Panjang dibagi dengan Total Aset
<i>Service Level Solvency berbasis Belanja (SLSBelanja)</i>	LnTotalBelanja dibagi dengan Total Penduduk
<i>Service Level Solvency berbasis Aset (SLSAset)</i>	LnTotalAset dibagi dengan Total Penduduk
Financial Dependence (FinDep)	Total Dana Alokasi Umum dibagi dengan Total Pendapatan
Kualitas IFR	Indeks IFR

Pengukuran Kualitas IFR menggunakan *checklist* yang diadopsi dari (Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasana, 2014) dan (Garcia & Garcia-Garcia, 2010). Kualitas IFR diukur dengan indeks, yaitu menjumlahkan skor komponen Konten, Timeliness, Teknologi yang Digunakan dan *User Support*, kemudian menghitung rasio skor perolehan tersebut dengan skor maksimum. Skor maksimum total Kualitas IFR adalah 50. Komponen indikator Konten disesuaikan dengan ketentuan komponen laporan keuangan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71/2010. Untuk *timeliness*, teknologi yang digunakan dan *user support* mengadopsi pengukuran Kualitas IFR Botti, Boubaker, Hamrouni, & Solonandrasana (2014) dan Garcia & Garcia-Garcia (2010) dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pengukuran Kualitas IFR ini tidak hanya mengukur ada atau tidaknya konten, melainkan mengukur kualitas konten secara

keseluruhan, yang mempertimbangkan penggunaan teknologi internet untuk menyajikan informasi. Pada *checklist* indeks IFR, konten sudah didesain untuk memperoleh porsi bobot yang lebih tinggi daripada *timeliness*, teknologi, dan *user support*. Pembobotan konten harus lebih besar daripada nonkonten, yaitu konten (60%) dan desain website yang meliputi *usability*, *navigation*, dan *timeliness* adalah 40%. (Rosmaini, Ariff, Kamil, & Hancock, 2009). Pada *checklist* Kualitas IFR penelitian ini, konten berbobot 60%, dan nonkonten 40%. Nonkonten (40%) tersebut terdiri dari *timeliness* (14%), teknologi yang digunakan (12%), dan *user support* (14%). Pengukuran indeks kualitas IFR ini adalah indeks yang dihitung secara keseluruhan skor IFR, bukan berupa penjumlahan indeks masing-masing komponen kualitas IFR.

$$\text{Indeks Kualitas IFR} = \frac{\text{Perolehan Skor IFR}}{\text{Skor Maksimum IFR}}$$

Hipotesis akan diuji menggunakan regresi dengan model sebagai berikut :

$$\text{KualIFR} = \alpha + \beta_1 \text{Lik} + \beta_2 \text{Lev} + \beta_3 \text{SLSBel} + \beta_4 \text{SLSAset} + \beta_5 \text{FinDep}$$

Kriteria penolakan H_0 adalah berdasarkan *quick look* output uji regresi SPSS, yaitu H_0 ditolak apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, dan H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah populasi penelitian ini adalah 542 pemda. Namun, yang dapat dijadikan sampel adalah 91 pemda. Berdasarkan data Neraca dan Realisasi APBD Tahun 2016, terdapat 95 pemda yang memiliki utang jangka panjang (untuk mengukur variabel *Leverage*), terdiri dari 56 Kabupaten, 28 Kota dan 11 Provinsi. Dari 95 pemda, terdapat 91 pemda yang dapat dijadikan sampel (Tabel 2). Empat Pemda yang tidak dapat dijadikan sampel karena situs tidak dapat diakses dan satu pemda karena ada data keuangan yang tidak tersedia. Tiga pemda yang situs resminya tidak

dapat diakses, yaitu : Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Papua Barat, dan Pemda Boalemo. Selain itu, Kabupaten Kota Baru tidak memiliki Utang Lancar pada tahun 2016, sehingga tidak dapat diukur *Current Ratio*-nya, dan dikeluarkan dari sampel.

Statistik deksriptif setiap variabel disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, Likuiditas minimum adalah 0,103 (Kabupaten Sidenreng Rappang), dan maksimum adalah 8.841,36 (Kabupaten Tapanuli Utara). Leverage minimum adalah 0,000025 (Kota Pekanbaru), dan maksimum 0,10047 (Kabupaten Puncak). Service Level Solvency dengan indikator Belanja, nilai minimum Rp 610.617/orang (Provinsi Jawa Timur) , dan maksimum Rp 31.420.363/orang (Kabupaten Fak-Fak) . Itu berarti bahwa Provinsi Jawa Timur membelanjakan Rp 610,617 untuk setiap anggota populasi penduduknya. Belanja yang dikeluarkan Kabupaten Fak-Fak untuk melayani anggota populasinya pada tahun 2016 adalah 31.420.363 pada tahun 2016. Service Level Solvency dengan indikator Aset, nilai minimum adalah Rp 771.005 (Provinsi Jawa Timur) dan nilai maksimum Rp 67.110.044 (Kabupaten Fak-Fak) . Pada tahun 2016, Provinsi Jawa Timur menyediakan aset senilai Rp 771.005 untuk setiap anggota populasi Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kabupaten Fak-Fak menyediakan aset senilai Rp 31.420.363 untuk setiap anggota populasi Kabupaten Fak-Fak. Financial Dependence minimum adalah 0,01 (Provinsi Aceh) dan maksimum 0,283 (Provinsi Maluku). Financial Dependence menunjukkan rasio antara DAU dengan Total Pendapatan. Itu berarti bahwa DAU Provinsi Aceh pada tahun 2016, hanya 1,05 % dari Total Pendapatannya. Sementara itu, DAU Provinsi Maluku adalah 28,37% dari Total Pendapatannya. Indeks IFR diukur secara menyeluruh pada empat komponen Kualitas IFR, meliputi: konten, *timeliness*, teknologi yang digunakan pemda pada *website*, dan *user support*. Indeks IFR minimum (0,11) adalah Kabupaten Konawe (0,11) dan Indeks IFR maksimum (0,79) adalah Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Min	Max	Mean	Std.Dev.
Likuiditas	0,103	8.841,36	126,52	927,26
Leverage	0,0000025	0,33	0,012	0,036
SLS_Bel	610.617	31.420.363	4.756.967	4.724.364
SLS_Aset	771.005	67.110.044	9.895.053,5	10.739.203
Fin.Dep.	0,01	0,283	0,157	0,071
Kual.IFR	0,11	0,79	0,325	0,167

n=91

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Komponen
Kualitas IFR**

Komponen	Min.	Max.	Mean	SD
Konten	0,00	0,81	0,1681	0,2105
<i>Timeliness</i>	0,286	1	0,6593	0,177
Teknologi	0,083	0,667	0,5458	0,1206
<i>User Support</i>	0,07	1	0,4741	0,2158

n=91

Tabel 3 menggambarkan indeks setiap komponen Kualitas IFR. *Mean* indeks Konten (0,1681) merupakan *mean* terendah dari empat komponen Kualitas IFR. Ini menunjukkan bahwa pada sampel penelitian ini, banyak pemda yang tidak mengunggah informasi keuangan seperti yang ditentukan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71/2010. Laporan tahun 2017 yang diunggah terbanyak adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja (36 pemda atau 39,56%), Perda APBD (27 pemda atau 29,67%), dan Laporan Realisasi Anggaran (26 pemda atau 28,56%). Pemda juga cenderung kurang memperhatikan konsistensi kebaruan dokumen yang diunggah. Dokumen keuangan yang paling banyak disajikan secara 3 tahun berurutan adalah Laporan Realisasi Anggaran (16 pemda atau 17,58%). Dokumen yang paling sedikit disajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Hanya ada enam pemda yang menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2017. Rincian jumlah pemda yang mengunggah konten IFR ada di Lampiran.

Komponen Kualitas IFR dengan *mean* indeks tertinggi adalah *Timeliness* (0,6593). Indeks *timeliness* menggambarkan kebaruan website pemda menyajikan informasi. Seluruh sampel

(100%) menyajikan *press release*, berita yang terkini, diperbarui dan sebagian besar (65,93%) pemda memperbarui beritanya di website pada tanggal pengamatan. Ada delapan pemda yang menyajikan informasi serapan anggaran tahun berjalan, enam pemda menyajikannya dalam bentuk html (6,59%) dan 2 pemda dalam bentuk pdf (2,19%). Ini menunjukkan bahwa pemda aktif digunakan untuk menyajikan informasi. Keberadaan PPID di pemda cukup membantu penyajian informasi di website. Ada upaya pemda untuk menyajikan informasi keuangan secara *timelines* walaupun masih sangat terbatas.

Selain *Timeliness*, komponen Kualitas IFR yang memiliki *mean* tinggi pada sampel penelitian adalah Teknologi yang digunakan pemda pada website (0,5458). Hampir semua (98,9%) sampel pemda telah mengembangkan website yang mengaktifkan multimedia. Sebanyak 82 (90,11%) menyediakan informasi keuangan dan kebijakan-kebijakannya dengan mengunggah dokumen sehingga pengguna dapat mengunduh dan menyimpan dokumen tersebut. Ada 38 (41,76%) pemda menyediakan fitur *online feedback* di website. Ini menggambarkan bahwa teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi di website sudah baik.

User Support adalah komponen Kualitas IFR yang menggambarkan sejauh mana website dapat memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. *Mean* indeks *User Support* adalah 0,4741, merupakan *mean* yang rendah setelah indeks Konten. Pada Lampiran tampak bahwa hampir semua (97,8%) website memiliki fitur tautan ke beranda/*homepage* untuk memudahkan pengguna kembali ke menu awal dan menyajikan fasilitas "*site search*" (91,21%). Fasilitas *site search* yang disediakan pemda tersebut berupa fitur yang memanfaatkan halaman *google search*, sehingga pengguna sebenarnya sama saja mencari dokumen secara langsung di *google* atau mencari dengan *site search* di website pemda. Cukup sulit untuk mendapatkan menu dan dokumen yang memuat informasi keuangan di website Pemda. Hanya ada 52 (57,14%) pemda yang

menyajikan menu Transparansi Keuangan Daerah (TKD) di Beranda/homepage. Dari 91 sampel penelitian ini, ada 24 (26,4%) pemda yang menyajikan menu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tetapi belum ada kontennya dan/atau dokumen yang diunggah ternyata bukan dokumen LKPD. Ada 7 (7,77%) pemda yang tidak menyajikan menu TKD dan tidak menyajikan menu LKPD di homepage, melainkan di website Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Rincian jumlah Pemda untuk komponen *user support* ada di Lampiran.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas. Hasil Uji Normalitas pada Unstandardized Residual menggunakan Kolmogorov- Smirnov $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa Unstandardized Residual berdistribusi Normal dengan nilai Asymp. Sig. = 0,266.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Residual

		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters ^a	Mean	0,00000
	Std.Dev	0,14840313
Most Extreme Differences	Positive	0,195
	Negative	-0,077
		1,004
		0,266
Kolmogorov-Smirnov Z		
Asymp. Sig. (2-tailed)		

^aTest distribution is Normal

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antarvariabel independen. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) semua variabel independen juga kurang dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinerarity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Likuiditas	0,997	1,003
Leverage	0,539	1,855
SLS_Belanja	0,273	3,668
SLS_Aset	0,314	3,186
FinDep	0,857	1,167

Dependent Variabel : KualitasIFR

Uji Heterokedastisitas menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai Absolut (unstandardized) Residual terhadap variabel independen. Pada Dengan $\alpha = 0,05$, pada Tabel 5 tampak bahwa tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variansi residual. Dengan demikian, tidak terjadi heterokedastisitas pada model penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Independen	t	Signifikansi
(Constant)	6,222	0,000
Likuiditas	-1,245	0,216
Leverage	0,009	0,993
SLS_Belanja	-0,350	0,727
SLS_Aset	-0,649	0,518
Financial Dependence	-1,461	0,148

Dependent Variable : AbsRes

Pada Tabel 6 tampak bahwa *adjusted R square* adalah 0,154 yang artinya bahwa hanya 15,4% variasi kualitas IFR yang dijelaskan oleh lima variabel independen, yaitu likuiditas, *leverage*, *service level solvency* –berdasarkan Belanja, *service level solvency* berdasarkan Aset dan *Financial Dependence*. Sisanya, sebesar 85,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan nilai *standard error of the estimate* (SEE) adalah 0,152706. Sehubungan dengan semakin kecil nilai SEE maka model regresi semakin tepat memprediksi variabel dependen, maka hasil nilai SEE yang kecil pada model penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian cukup baik. Dari hasil F-Test (Tabel 7) nilai F hitung 4,277 dan signifikansinya 0,002. Oleh karena nilai signifikansi uji F

tersebut (0,002) lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas IFR.

Tabel 7. R Square dan Adjusted R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.201	.154	.152706

a. Predictors: (Constant), Fdep_DAUPdpt, Likuiditas_CR, Leverage, ServLSolv_Aset, ServLSolv_Bel

b. Dependent Variable: IndeksIFR

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.499	5	.100	4.277	.002 ^a
	Residual	1.982	85	.023		
	Total	2.481	90			

a. Predictors: (Constant), Fdep_DAUPdpt, Likuiditas_CR, Leverage, ServLSolv_Aset, ServLSolv_Bel

b. Dependent Variable: IndeksIFR

Tabel 9. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Stand. Coeff	t
	B	Std.Err	B	
(constant)	0,408	0,046		8,882
Likuiditas	-1,138E-5	0,000	-0,064	-0,655
Leverage	-0,250	0,610	-0,054	-0,410
SLS_Bel	-2,016E-8	0,000	-0,574	-3,089
SLS_Aset	6,753E-9	0,000	0,437	2,524
FinDep	-0,342	0,246	-0,146	-1,389

Dependent Variable: KualitasIFR (Indeks IFR)

Tabel 8 menyajikan hasil uji regresi. Dari Tabel 8 tersebut tampak bahwa variabel *Service Level Solvency* (SLS) Belanja (H3) dan SLS berbasis nilai Aset (H4) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas IFR dengan $\alpha=0,05$. Namun, dengan arah signifikansi yang berbeda.

Signifikansi pengaruh SLSBelanja terhadap Kualitas IFR adalah signifikan negatif. Ini menunjukkan bahwa H3 tidak dapat terbukti. Semakin besar rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah untuk setiap penduduknya, maka semakin rendah indeks IFR-nya. Pada penelitian ini, Kabupaten Fak-Fak dengan SLSBelanja tertinggi pada sampel penelitian ini, yaitu Rp 31.420.363,7 per penduduk memiliki indeks IFR 0,2. Kepulauan Mentawai dengan SLSBelanja tertinggi kedua, yaitu Rp 21.915.591 per penduduk memiliki

indeks IFR 0,1. Provinsi Jawa Timur dengan SLSBelanja terendah dalam kelompok sampel penelitian ini yaitu Rp 610.617,05 per penduduk memiliki indeks IFR 0,7. Kabupaten Purbalingga dengan indeks IFR tertinggi 0,8 memiliki nilai SLSBelanja Rp 2.020.099,94 per penduduk. Penelitian ini menggunakan sampel yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota. Signifikansi arah negatif tersebut mungkin disebabkan oleh karena fokus belanja pemda lebih untuk mendanai layanan penduduk yang sifatnya langsung dapat dirasakan oleh penduduk, seperti pelayanan perijinan, akte kelahiran, pembayaran PBB, dan sebagainya, daripada mendanai layanan informasi keuangan. Pertanggungjawaban publik bisa jadi masih lebih berupa pemberian layanan yang berdampak langsung pada publik daripada layanan informasi melalui website pemda. Hasil seperti ini juga diperoleh Purwanti, Akram, & Supratman (2017). Purwanti, Akram, & Supratman (2017)

menyatakan Rasio Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap IFR, dan itu berarti ada kecenderungan bahwa pada daerah dengan nilai belanja untuk tiap penduduknya cukup besar, penyajian informasi keuangan di internet dalam level kualitas yang rendah.

0,168 *Service Level Solvency - Aset* (rasio aset dengan jumlah penduduk) terhadap Kualitas IFR. Berdasarkan Tabel 8, SLSAset berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas IFR ($t=2,671$, sig. 0,009), dan menunjukkan bahwa H4 terbukti. Konsisten dengan Styles & Tennyson (2007)., hasil ini mendukung teori agensi dan teori legitimasi yang menyatakan bahwa pada institusi dengan aset yang besar cenderung akan menyajikan informasi lebih baik. Semakin tinggi nilai aset yang disediakan Pemda untuk setiap penduduknya, maka pemda tersebut cenderung mampu menyajikan informasinya melalui internet dengan kualitas yang lebih baik. Daerah dengan nilai aset yang tinggi dapat menyediakan fasilitas sistem informasi yang memadai, sehingga memungkinkan pemda tersebut untuk menyajikan informasi keuangan di internet. Ini menunjukkan pentingnya aset daerah untuk dapat

meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan di internet.

H1 bertujuan untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap Kualitas IFR. Tampak pada Tabel 8 likuiditas tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap Kualitas IFR ($t = -660$, sig. 0,499). Hasil seperti ini konsisten dengan hasil penelitian Ahmed & Curtis (1999), Aly, et al. (2010), dan Miniaoui, et al., (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak terbukti signifikan dengan pengungkapan di internet. Garrido-Rodriguez, et al., (2018) juga menyatakan bahwa *service level solvency* yang diprosikan dengan likuiditas tidak terbukti signifikan berhubungan dengan transparansi informasi keuangan dan penganggaran. Pada penelitian ini, tampak bahwa Kabupaten Purbalingga dengan Indeks IFR tertinggi (0,79) memiliki nilai *current ratio* 8,23 dan Kabupaten Konawe yang memperoleh indeks IFR terendah (0,11) memiliki nilai *current ratio* 1,92. Pemda yang memiliki indeks IFR tertinggi dan terendah keduanya tidak mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan *current ratio* yang di atas 1. Pemda yang memperoleh indeks IFR tertinggi dan terendah, keduanya memiliki nilai aset lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya. Pemda yang memiliki *current ratio* terendah (0,103) adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki indeks IFR yang juga rendah, yaitu 0,24. Pemda dengan *current ratio* tertinggi (8.841,362) adalah Kabupaten Tapanuli Utara ternyata memiliki indeks IFR yang rendah juga, yaitu 0,21. Likuiditas yang tinggi tidak menjamin suatu pemda untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik di website.

Berdasarkan Tabel 8, H2 tidak terbukti. *Leverage* tidak terbukti berpengaruh terhadap Kualitas IFR Pemda ($t = -434$, sig. 0,665). Hasil ini konsisten dengan Garcia & Garcia-Garcia (2010), Albalate del Sol (2013), Verawaty (2015), Pontoh, Rura, Rahman, & Ibrahim (2018) dan Nosihana & Yaya (2016) yang juga menyatakan bahwa pengaruh *leverage* terhadap eksistensi IFR tidak terbukti. Kota Pekanbaru yang memiliki nilai *leverage* terendah (0,0000025) memiliki indeks IFR

0,29 dan Kabupaten Puncak dengan *leverage* tertinggi (0,10047) memiliki indeks IFR 0,18. Baik pemda dengan *leverage* tertinggi dan terendah keduanya memperoleh indeks IFR yang rendah. Berdasarkan hasil ini, *leverage* tidak terbukti menjadi faktor yang mendorong kualitas informasi keuangan melalui internet di institusi pemerintah daerah.

Financial Dependency (H5) tidak terbukti berpengaruh terhadap Kualitas IFR ($t = -1,038$, sig. = 0,302). Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Nainggolan & Purwanti (2016) dan Hilmi & Martani (2012), yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara ketergantungan daerah (atau kemandirian daerah) terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi finansial Pemerintah Daerah yang mencakup *short-term solvency*, *long-term solvency*, *service level solvency* berbasis belanja, *service level solvency* berbasis aset, dan ketergantungan finansial terhadap Kualitas IFR. Terdapat 91 pemda yang terdiri dari 53 kabupaten, 28 kota dan 10 provinsi yang menjadi sampel pada penelitian ini. Pada tahun penelitian ini berjalan, yaitu tahun 2018, Neraca dan Realisasi APBD terkini yang dikompilasi oleh PPID Kemenkeu RI adalah Neraca dan Realisasi APBD tahun 2016, karena laporan keuangan tahun 2017 masih ada pemda yang belum selesai diaudit BPK dan belum semua data Laporan Keuangan Pemda dicatat oleh Kemenkeu RI. Oleh karena itu, data keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah data keuangan tahun 2016, dan pengamatan untuk variabel Kualitas IFRnya dilakukan pada akhir tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *short-term solvency*, *long-term solvency* dan *financial dependence* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas IFR. Sementara itu, *service level solvency* berbasis nilai Belanja dan nilai Aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas IFR. *Service level solvency* berbasis nilai belanja pemda berpengaruh signifikan negatif terhadap Kualitas IFR. Hasil

ini cukup unik, karena menggambarkan bahwa jika belanja Pemda untuk setiap individu penduduknya nilainya makin besar, maka kualitas IFR-nya akan menurun. Sebaliknya, jika belanja Pemda untuk setiap orang penduduknya makin kecil, maka Kualitas IFR akan meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenis realisasi belanja pemda yang lebih fokus pada belanja untuk layanan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan untuk penyediaan informasi keuangan. *Service level solvency* berbasis nilai aset berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas IFR. Sejalan dengan teori agensi dan teori legitimasi, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rasio aset pemda terhadap jumlah penduduk berperan penting untuk peningkatan kualitas IFR. Pemda yang memiliki nilai aset tinggi untuk masing-masing penduduknya akan mampu menyediakan fasilitas sistem informasi yang memadai sehingga memungkinkan untuk menjaga kualitas IFR. Penggunaan *service level solvency* berbasis aset ini juga menggambarkan bahwa untuk dapat menghasilkan IFR yang berkualitas, peningkatan nilai aset saja tidak cukup, melainkan juga harus memperhatikan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk suatu pemda meningkat, maka aset pun harus ditambah, untuk dapat menghasilkan kualitas IFR yang baik. Namun, penelitian ini belum dapat membuktikan signifikansi variabel *short-term solvency*, *long-term solvency*, dan ketergantungan finansial terhadap Kualitas IFR.

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. *Pertama*, nilai SEE yang kecil ($SEE = 0,151967$), hasil signifikansi uji F ($sig. 0,001$) *adjusted R square* yang kecil ($0,162$) mengindikasikan bahwa model pada penelitian ini fit dan dapat digunakan namun hanya 16,2% variasi kualitas IFR yang dijelaskan oleh variabel independen, sehingga 83,8% ($100\% - 16,2\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, dapat melibatkan variabel-variabel independen lain. *Kedua*, tantangan pada penelitian semacam ini adalah bahwa perkembangan

kualitas situs dan konten di internet cukup dinamis, sehingga kualitas IFR tidak cukup ditinjau dari pengamatan di internet sesekali saja. Untuk mengisi skor kualitas IFR yang diukur berdasarkan pengamatan di situs harus berdasarkan pengamatan berulang-ulang untuk memastikan bahwa skor sudah konsisten pada rentang waktu penelitian. Peneliti perlu memperhatikan tenggat waktu pelaporan keuangan dan audit sehingga dapat menengarai kecenderungan waktu kapan ada konten yang baru. Selain itu, kebanyakan situs yang tidak menyajikan tanggal unggah, atau tanggal pembaruan situsnya. Oleh karena itu, untuk penelitian kualitas IFR selanjutnya, dapat menggunakan metode penelitian yang lain, seperti metode kualitatif untuk menggali kualitas IFR lebih mendalam. *Ketiga*, data sampel menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan di *website* masih sangat terbatas, padahal komponen secara teknologi yang digunakan pada *website* sudah memadai untuk menyajikan informasi. Oleh karena itu, masih dibutuhkan penelitian selanjutnya yang mencari penyebab rendahnya penyajian informasi keuangan pemda, serta meneliti kebermanfaatan informasi yang disajikan di *website* Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, R. D., & Haryanto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (3), pp. 1-11.
- Albalate del Sol, D. (2013). The Institutional, Economic and Social Determinants of Local Government Transparency. *Journal of Economic Policy Reform*, 16 (1), pp. 90-107.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17, pp. 100 - 109.

- Berlinski, S., Dewan, T., & Dowding, K. (2012). *Accounting for Ministers: Scandal and Survival in British Government 1945-2007*. New York: Cambridge University Press.
- Bolívar, M. P., Muñoz, L. A., & Hernández, A. M. (2013). Determinants of Financial Transparency in Government. *International Public Management Journal*, November, 16(4), pp. 557-602.
- Botti, L., Boubaker, S., Hamrouni, A., & Solonandrasana, B. (2014). Corporate Governance Efficiency and Internet Financial Reporting Quality. *Review of Accounting and Finance*, 13(1), pp. 43-64.
- Damaso, G., & Lourenco, I. C. (2011). Internet Financial Reporting: Environmental Impact Companies and Other Determinants. *8th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics, July 11-12*.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48, pp. 147-160.
- Diptyana, P., & Rokhmania, N. (2018). Exploring Government Internet Financial Reporting in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21 (1), pp. 115-138.
- Garcia, A. C., & Garcia-Garcia, J. (2010). Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36 (5), pp. 679-695.
- Guillamon, M.-D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The Determinants of Local Government's Financial Transparency. *Local Government Studies*, 37(4), pp. 391-406.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV*
- Idris, A. L., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Research*, 9(1), pp. 62-74.
- Ingram, R. W., & DeJong, D. V. (1987). The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practices. *Journal of Accounting and Public Policy*, 6 (4), pp. 245-270.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, pp. 101 - 121.
- Martani, D., Fitriyani, D., & Annisa. (2014). Financial Performance Transparency on The Local Government Website in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 60 (3), pp. 504-516.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83, pp. 340-363.
- Munoz, L. A., Bolivar, M. P., & Hernandez, A. M. (2017). Transparency in Government: A Meta-Analytic Review of Incentive for Digital versus Hardcopy Public Financial Disclosure. *American Review of Public Administration*, 47(5), pp. 550-573.
- Nainggolan, T. A., & Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX*.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3, pp. 89-104

- Pereira, M. A., Amaral, E. F., & Costa, M. M. (2012). Some Determinants of The Existence of Government Websites in 853 Municipalities in Minas Gerais, Brazil. *Latin American Research* , 47(3), pp. 155-174.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2015). Is Government Promoting Convergence Toward More Accountable Local Government. *International Public Management Journal* , 13(4), pp. 350-380.
- Pontoh, G. T., Rura, Y., Rahman, A., & Ibrahim, M. A. (2018). Internet Financial Reporting of Public Institutions and E-Government as A Medium of Good Governance in Indonesia. *Journal of Finance and Banking Review* , 3(3), pp. 28-33.
- Purwanti, R. E., Akram, & Supratman, L. (2017). The Determinants Transparency and Accessibility of Internet Financial Reporting on Local Government in Indonesia. *STIE Mandala International Conference and Call for Paper, Jember* .
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV* .
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi* , 1(2), pp. 28-48.
- Rosmaini, Siti., Ariff, Mohd., Kamil, Muhd. (2009). Business Reporting on The Internet : Development of a Disclosure Quality Index. *International Journal of Business and Economics*, 8 (1), pp. 55-79.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. *Public and Municipal Finance* , 1(2), pp. 37-50.
- Scott, W. R. (1987). The Adolescence of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly* , 32, pp. 493-511.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* , 19(1), pp. 56-92.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014, Mataram Lombok). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII* .
- Utomo, K. C., & Aryani, Y. A. (2016). The Determinant of Financial Information Disclosure of Indonesian LGs Website. *Asia Pacific Fraud Journal* , 1(1), pp. 85-102.
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesabilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi, September*.
- Yu, H. (2010). On the Determinants of Internet-Based Disclosure of Government Financial Information. *Proceedings of International Conference on Management and Service Science Management and Service Science* .
- Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemda Tingkat Provinsi se-Indonesia). *Jurnal Profita* , 11, pp. 34 - 52.

LAMPIRAN

Checklist Kualitas IFR

No.	Jenis Konten dalam Satu Tahun Terakhir	Jumlah Pemda pada setiap <i>item checklist</i> (bobot)				
		Non pdf & non html (0,5) ^a	.pdf (0,75)	html (1)	Ada	Tidak ada (0)
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	1	19	0	21	71
1.2.	Laporan Realisasi Anggaran	1	21	4	26	65
1.3.	Laporan Arus Kas	2	13	0	15	76
1.4.	Laporan Perubahan Ekuitas	2	9	0	11	80
1.5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	1	5	0	6	85
1.6.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	34	1	36	55
1.7.	Opini BPK	0	8	2	10	81
1.8.	Ringkasan RKA-SKPD	0	12	2	14	77
1.9.	Ringkasan RKA-PPKD	0	9	2	11	80
1.10.	Rancangan Perda APBD	0	12	0	12	79
1.11.	Perda APBD	0	27	0	27	64
1.12.	Ranperda Perubahan APBD	0	12	0	12	79
1.13.	Perda Perubahan APBD	0	14	0	14	77
1.14.	Ringkasan DPA-SKPD	0	12	2	12	77
1.15.	Ringkasan DPA-PPKD	0	14	2	14	75

^{a)}excel, msword dan sejenisnya.

No.	Konten Informasi Tahun Sebelumnya	Jumlah Pemda pada setiap <i>item checklist</i> (bobot)					
		2 tahun tidak berurutan (0,25)	3 tahun tidak berurutan (0,5)	2 tahun berturut-turut (0,75)	Lengkap berurutan ≥3 tahun (1)	Ada	Tidak Ada (0)
1.1.	Laporan Posisi Keuangan	5	1	9	11	26	65
1.2.	Laporan Realisasi Anggaran	9	1	11	16	37	54
1.3.	Laporan Arus Kas	6	0	11	10	27	64
1.4.	Laporan Perubahan Ekuitas	3	1	9	3	26	75
1.5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	5	0	5	3	23	78
1.6.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	10	1	13	10	34	57
1.7.	Opini BPK	11	0	6	4	21	70
1.8.	Ringkasan RKA-SKPD	11	0	8	13	32	59
1.9.	Ringkasan RKA-PPKD	13	1	5	10	29	62
1.10.	Rancangan Perda APBD	11	2	5	11	29	62
1.11.	Perda APBD	13	1	8	14	36	55

PEPIE DIPTYANA/ Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Internet
Financial Reporting

No.	Konten Informasi Tahun Sebelumnya	Jumlah Pemda pada setiap <i>item checklist</i> (bobot)					
		2 tahun tidak berurutan (0,25)	3 tahun tidak berurutan (0,5)	2 tahun berturut-turut (0,75)	Lengkap berurutan ≥ 3 tahun (1)	Ada	Tidak Ada (0)
1.12.	Ranperda Perubahan APBD	7	1	6	9	23	68
1.13.	Perda Perubahan APBD	7	2	8	9	26	65
1.14.	Ringkasan DPA-SKPD	10	0	9	12	31	60
1.15.	Ringkasan DPA-PPKD	11	0	8	10	29	62

2. Timeliness

No.	Jenis	Checklist (bobot)	Jumlah Pemda (%)
2.1.	Press Release (berita)	Ada (1) / Tidak (0)	Ada = 91 (100%)
2.2.	Lamanya <i>update</i> berita	Pada hari pengamatan (3) s.d. 1 minggu sejak tanggal pengamatan (2) > 1 minggu sejak tanggal pengamatan (1)	60 (65,93%) 17 (18,68%) 4 (4,39%) 0 (0%)
2.3.	Informasi serapan anggaran tahun berjalan	Tidak ada pembaruan berita (0) Ada dalam bentuk html (1) Ada dalam bentuk pdf (0,75) Tidak ada (0)	6 (6,59%) 2 (2,19%) 83 (91,21%)
2.4.	<i>Update</i> Informasi yang Tersedia Setiap Saat	Tahun berjalan (1) Tahun lalu (0,5) >2 tahun (0,25) Tidak ada (0)	62 (68,13%) 14 (15,38%) 2 (2,2%) 13 (14,29%)
2.5.	<i>Update</i> Informasi Serta Merta	Tahun berjalan (1) Tahun lalu (0,5) >2 tahun (0,25) Tidak ada (0)	22 (24,17%) 3 (3,3%) 2 (2,2%) 64 (70,33%)

Definisi Informasi Tersedia Setiap Saat dan Informasi Serta Merta pada instrumen ini mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Teknologi yang digunakan di website

No.	Jenis Teknologi	Checklist (bobot) ^b	Jumlah Pemda (%)
3.1.	<i>Download plug-in</i>	Ada (0,5)	82 (90,11%)
3.2.	<i>online feedback</i>	Ada (0,5)	38 (41,76%)
3.3.	<i>Presentation slides</i>	Ada (1)	58 (63,74%)
3.4.	Multimedia	Ada (2)	90 (98,9%)
3.5.	Perangkat analisis	Ada (2)	0 (0%)

^bTidak Ada, bobot = 0

4. *User Support*

No	Jenis Dukungan terhadap Pengguna Website	Checklist (Bobot)	Jumlah Pemda
4.1.	Help dan FAQ	Ada (0,5)	23 (25,27%)
		Tidak ada (0)	68 (74,73%)
4.2.	Tautan ke <i>homepage</i>	Ada (0,5)	89 (97,8%)
		Tidak ada (0)	2 (2,2%)
4.3.	<i>Site Map</i> / peta situs	Ada (0,5)	5 (5,49%)
		Tidak ada (0)	86 (94,51%)
4.4.	<i>Site Search</i> / pencarian	Ada (0,5)	83 (91,21%)
		Tidak ada (0)	8 (8,79%)
4.5.	Menu Transparansi Keuangan Daerah di <i>homepage</i>	Ada (1)	52 (57,14%)
		Tidak ada (0)	39 (42,86%)
4.6.	Jumlah klik untuk mengakses LKPD	1 kali klik (1)	36 (39,56%)
		2 kali klik (0,5)	18 (19,78%)
		>2 kali klik (0,25)	9 (9,89%)
4.7.	Informasi/Prosedur Layanan Permohonan Informasi	Ada (1)	52 (57,14%)
		Tidak ada (0)	39 (42,86%)
4.8.	Ketersediaan formulir layanan permohonan informasi	e-form (1)	34 (37,36%)
		form manual yang diunduh-dicetak-diserahkan ke kantor layanan (0,5)	18 (19,78%)
		Tidak ada (0)	49 (53,85%)
4.9.	Grafik informasi keuangan Pemda	Ada ter- <i>update</i> satu tahun terakhir (1)	10 (10,99%)
		Ada ter- <i>update</i> >2 tahun (0,5)	2 (2,2%)
		Tidak ada (0)	79 (86,81%)

